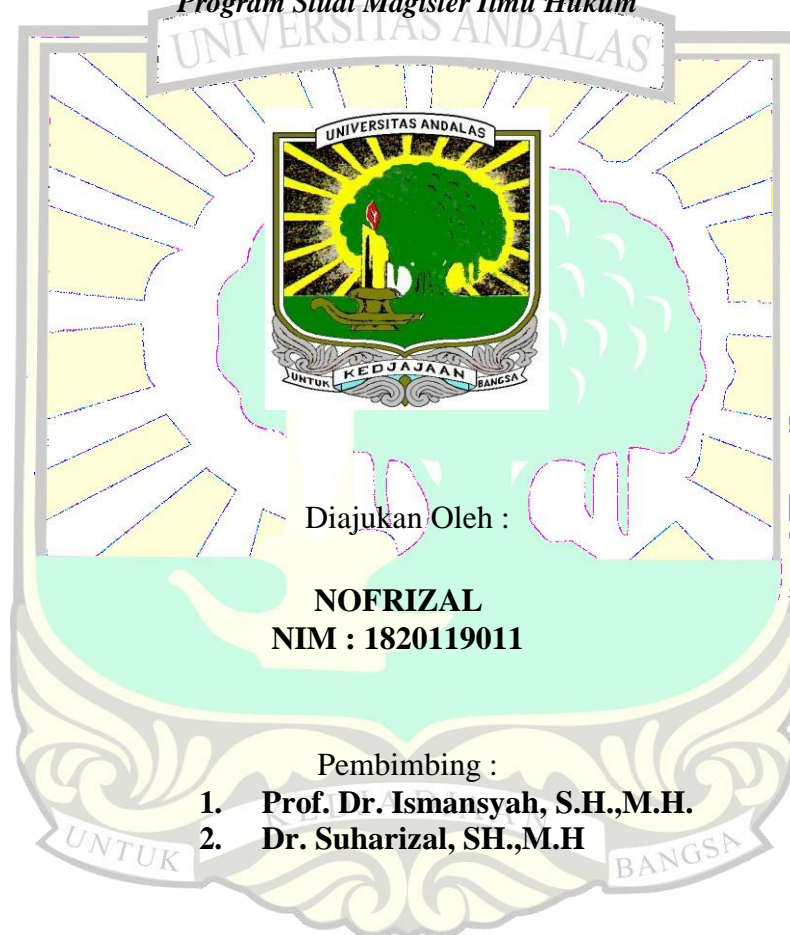


**HAMBATAN PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI
PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA TUNTUTAN KEPERDATAAN
ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Strata -2
Program Studi Magister Ilmu Hukum*



Diajukan Oleh :

NOFRIZAL
NIM : 1820119011

Pembimbing :

1. **Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H.**
2. **Dr. Suharizal, SH.,M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara
Negara Dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi**
(Nofrizal No. BP 1820119011, Universitas Andalas, 166 hlm, 2020)

ABSTRAK

Berdasarkan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara untuk mengembalikan aset korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. 2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Jaksa sebagai Pengacara dapat melakukan perampasan terhadap barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi dan memburu aset dan pelakunya. Jaksa sebagai pengacara Negara dapat menghimpun data dan keterangan dimanapun pelaku berada untuk melakukan koordinasi dalam penyidikan untuk menyelamatkan aset Negara. Kendala dalam pengambilan aset korupsi masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan aset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, tidak jelasnya political will pemerintah, dan pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Korupsi

**Barriers To The Implementation Of The Authority Of The Prosecutor As
Lawyer Countries In Efforts To The Demands Of Civil Assets Is The Proceeds
Of Crime Of Corruption Based On Law Number 20 Year 2001 On
Eradication Of Corruption**

(Nofrizal No. BP 1820119011, Andalas University, 166 pp., 2020)

ABSTRACT

Based on the Authority of the Prosecutor As the State's Attorney relating to the return of State assets from proceeds of corruption. The prosecutor's office is given the authority for and on behalf of the state or the government as plaintiff or defendant which in their implementation give consideration or to defend the interests of the state or the government as the state's attorney for the return of assets of corruption. The issues raised in this research 1. How does the authority of the attorney as the executor in making the assets the proceeds of corruption and the payment of money substitutes in a corruption case. 2. The constraints are encountered in the retrieval of the assets of corruption. The research method used is normative juridical. The prosecutor as a Lawyer can do a deprivation of any tangible and intangible assets acquired from the proceeds of corruption and hunt down the asset and the culprit. The prosecutor as the State's attorney can collect data and description wherever the offender is to perform the coordination in the investigation to save the Country's asset. Constraints in the retrieval of assets corruption is still constrained by agreements between Countries and the differences in the legal systems in every Country, limited the investigation team due to funding constraints, the mastery of the assets of a third party not related to the perpetrators of corruption, no clear political will of the government, and the perpetrators are outside the country, namely the issue of Extradition.

Keywords: The Prosecutor Attorney Of The State, Corruption

